

BAB I PENDAHULUAN

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf yang melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat baik secara Administrasi maupun secara teknis. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

a. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan rencana tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019 yang menjadi landasan/pedoman/acuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk digabung menjadi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sudah melakukan kajian dan pertimbangan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dan capaian kinerja terhadap Rencana Strategik Sekretariat DPRD tahun 2016-2021.

Penyusunan Renja ini dilakukan dengan menghimpun masukan-masukan dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik Bagian Perisidangan, Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Rencana Kerja ini merupakan pedoman guna Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tugas Pokok Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
4. Penyelenggaraan Koordinasi Tenaga Ahli yang dibutuhkan DPRD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 namun dalam RKPD tahun 2018 tidak terdapat usulan program yang disusun dalam Penyempurnaan Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat DPRD yaitu program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip Daerah, ini penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada DPRD dengan mendata dan mendokumentasikan seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD baik dalam satu tahunan maupun dalam lima tahunan sehingga dengan pendataan yang rapi sewaktu-waktu dibutuhkan produk-produk DPRD dapat ditemukan seketika dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama ini merupakan salah satu perwujudan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD hubungan dengan Renja Kementrian/Lembaga ada satu Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dengan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dan kaitannya Renja Sekretariat DPRD dengan Kabupaten/Kota secara langsung belum jelas namun dengan dilaksanakan fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan, maka secara tidak langsung ada keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan Renja Kabupaten/Kota, Renja yang disusun adalah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

Rencana Kerja yang diajukan oleh Sekretariat DPRD tahun 2019 dengan beberapa program dan

kegiatan nantinya akan menjadi dasar pengalokasian dana dalam penyusunan KUA/PPAS tahun 2019 untuk menjadi RAPBD yang akan ditetapkan mejadi APBD Tahun 2019 dengan catatan Rancangan Rencana Kerja tersebut harus mendapat legitimasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam RKPD Pemerintah Daerah.

b. Landasan Hukum

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438).
3. Undang–Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan terakhir Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. SE Gubernur Nomor 050/99/II/Renmakro/Bappeda-2018 tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPDP tahun 2019 sebagai bahan Penyusunan Rancangan Renja OPD tahun 2019.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Perda No. 5 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
15. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 tanggal 5 Februari tahun 2018.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
19. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021.
20. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 16 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

c. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan (RKA) Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun 2019, agar program dan kegiatan yang disusun ada sinkronisasi dengan Rencana Kerja (Renja) yang disusun untuk tahun 2019 dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintahan

yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dewan.

Sebagai tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2019.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

d. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan pendanaan untuk tahun 2019.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 terdapat 9 (sembilan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan, program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan, namun di dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, baik secara fisik maupun keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2017 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini untuk memfasilitasi pembayaran Telepon Kantor dan Rumah Dinas, Air Kantor dan Rumah Dinas, Listrik Kantor, dan Rumah Dinas, Rekening Internet, TV Kabel. Realisasi sesuai dengan besaran tagihan telepon, listrik dan air serta efisiensi pemakaian air dan listrik.
- b. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas dan Mess DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Premi Asuransi Aset Bangunan dan Kendaraan Dinas, dalam pelaksanaannya biaya sesuai kebutuhan dan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk general check-up agar kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD terjaga, dalam pelaksanaannya ada beberapa Anggota DPRD yang tidak melakukan medical check up mengakibatkan kegiatan ini tidak mencapai target.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar dan pengadaan bahan buku-buku

pustaka keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada kegiatan ini adanya efisiensi disebabkan karena adanya beberapa media cetak tidak tertib dan tidak dibayarkan.

- e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah digunakan untuk koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dan bersifat undangan bagi Pimpinan DPRD. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sesuai kebutuhan dan adanya efisiensi.
- f. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur agar dapat terwujudnya pembinaan mental dan fisik aparatur diantaranya pelaksanaan senam, pembaca doa / al quran dan penceramah. Kegiatan ini efisiensi diakibatkan karena adanya pelaksanaan wirid bulanan dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat.
- g. Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD
Kegiatan pengelolaan dan pendataan dokumen arsip, kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh dokumen-dokumen di Sekretariat DPRD khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan produk DPRD, sidang dan rapat DPRD sehingga seluruh dokumen terdata dengan baik dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat ditemukan dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mendapatkannya. Kegiatan ini tidak mencapai seperti yang diharapkan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 5 (lima) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional bertujuan agar tersedianya kendaraan dinas/operasional bagi Pimpinan DPRD. Adanya efisiensi atas penggunaan anggaran ini akibat pembelian kendaraan yang dibawah jenis spesifikasi awal (double garda).
- b. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor digunakan untuk mewujudkan pengadaan Peralatan/Perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas. Seluruh kegiatan terlaksana, sisa anggaran merupakan efisiensi.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor bertujuan agar terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD untuk menunjang kelancaran tugas. Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran namun secara fisik telah sesuai dengan target.

- d. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**
Kegiatan ini untuk perbaikan kendaraan dinas/operasional DPRD Provinsi Sumatera Barat. Adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan akibat penyerahan kendaraan operasional Dewan sebanyak 34 unit kepada Sekretariat Daerah terkait dengan diberlakukannya PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Anggota DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas dibayarkan tunjangan transportasi.
 - e. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess**
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan yang ada pada rumah jabatan seperti pemeliharaan AC, instalasi listrik, telepon, air, internet dan asset tetap lainnya. Pada kegiatan ini dilakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dalam melaksanakan perbaikan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess.
 - f. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD dengan tujuan tugas-tugas DPRD dapat terlaksana dengan baik. Adanya efisiensi akibat penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** ada 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. Pada kegiatan ini adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** ada 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :
- a. **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan kemampuan staf terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan ini baru dapat terlaksana jika adanya undangan atas kerjasama Pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan. Pada kegiatan ini adanya efisiensi karena faktor eksternal, pelaksanaan disesuaikan dengan undangan pihak terkait.
 - b. **Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan**
Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan staf, meningkatkan wawasan dibidang tugas masing-masing karena peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas selalu berkembang terus menerus. Kegiatan bimtek ini pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah baik

Pemerintah Daerah maupun Pusat dengan mempedomani undangan yang dikirimkan ke masing-masing OPD. Pada kegiatan ini adanya efisiensi karena faktor eksternal, pelaksanaan disesuaikan dengan undangan pihak terkait.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, dalam pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran BBM, foto copy, cetak dan penggandaan.

6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset ada 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah:

a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan menyusun anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya pada dokumen anggaran baik anggaran murni, pergeseran anggaran dan anggaran perubahan, dengan tujuan anggaran dapat tersusun dan terencana sesuai dengan kebutuhan. Adanya efisiensi pembelian bahan pakai habis, cetak, penggandaan, makan minum dan perjalanan dinas pada pelaksanaan kegiatan.

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ada 8 (delapan) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda

Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dalam pelaksanaan bertujuan agar tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaan Adanya efisiensi perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembahasan Ranperda dan pelaksanaan konsultasi.

b. Kegiatan Reses

Kegiatan ini ditujukan untuk menjemput aspirasi kepada masyarakat dengan melakukan Kunjungan Kerja Kelompok dan Perorangan. Seluruh kegiatan terlaksana, sisa anggaran merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas (biaya penginapan) karena biaya penginapan perjalanan dinas Reses Dalam Daerah Anggota DPRD hanya mengambil 30% menyebabkan realisasi keuangan kegiatan dibawah batas minimum yang ditetapkan.

c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan melakukan kunjungan kerja ke Luar, Dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Luar Negeri dengan tujuan melihat perkembangan di daerah tempat tujuan untuk dapat

diterapkan di Daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan studi perbandingan untuk disampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan adanya efisiensi perjalanan dinas luar negeri yang disesuaikan dengan undangan mitra kerja.

d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD terhadap bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan adanya kegiatan perjalanan dinas yang tidak terlaksana karena terlambatnya izin dari Mendagri.

e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kegiatan dan produk-produk DPRD yang dihasilkan selama tahun anggaran 2017. Pada pelaksanaan adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan.

f. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Dewan dalam satu tahun Anggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar terlaksana sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dan ketersediaan waktu pelaksanaan.

g. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan sekaligus menelaah dan mengkaji persoalan yang berkembang untuk menyusun kebijakan tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi agar terwujudnya keserasian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan.

h. Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas Ranperda yang akan dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dengan menerima masukan dari Dewan Pakar dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sampai akhir tahun 2017 kegiatan ini terlaksana namun dalam pelaksanaan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan.

Sedangkan yang memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan baik fisik maupun keuangan dengan rincian :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertujuan agar terwujudnya Pengiriman surat yang tepat sasaran.
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan, pengaman dan sopir kantor bertujuan untuk Tersedianya kenyamanan, kebersihan, keamanan kantor dan pelayanan kedinasan.
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor bertujuan agar tersedianya Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran tugas.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertujuan untuk agar tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan Kantor.
- e. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan agar tercapainya ketersediaan penerangan pada bangunan perkantoran.
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga keperluan kantor untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kedewanan.
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sarannya adalah tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka melaksanakan rapat-rapat sebagai salah satu tugas pokok DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan.

2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 8 (delapan) kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya :

- a. Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan ruangan yang representatif bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD agar Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD dapat bekerja dengan tenang dan nyaman melaksanakan kegiatan keseharian.

- b. **Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess**
Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya peningkatan pelayanan kedewanan.
- c. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan**
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan dinas, pimpinan DPRD untuk menunjang kelancaran tugas pimpinan DPRD.
- d. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan**
Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris.
- e. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur**
Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya pemeliharaan Mebeleur untuk menunjang kelancaran tugas.
- f. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan**
Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya instalasi dan jaringan Kantor.
- g. **Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Dinas/Mess**
Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya pelayanan yang terbaik.
- h. **Rehabilitasi Sedang dan Berat Gedung Kantor**
Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya pelayanan yang terbaik.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ada 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target yaitu :

Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, Kegiatan penatausahaan keuangan SKPD ini bertujuan untuk menata dan menyusun pelaksanaan kegiatan keuangan SKPD di Sekretariat DPRD dengan baik dari awal pelaksanaan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan.

4. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset ada 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target yaitu:

Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD bertujuan agar terwujudnya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang SKPD.

5. Peningkatan Pelayanan Kedinasan ada 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target yaitu:

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah bertujuan agar terlaksananya koordinasi pembangunan pemerintah daerah.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kegiatan memenuhi target yaitu :

- a. **Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah**

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah bertujuan agar terpublikasinya Kegiatan Dewan di Media Cetak dan Elektronik.

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		Sisa	Hasil / Outcome	Indikator Output Kegiatan			Permasalahan / Hambatan
			Rp.	Rp.			%	Rp.	Kualitatif	
		Target			Realisasi					
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,891,939,050	11,146,290,776	94%	745,648,274					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,527,898,800	1,492,622,600	98%	35,276,200	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas	12 bulan	12 bulan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,740,540,000	1,466,264,328	84%	274,275,672	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Tersedianya pembayaran internet, SIPKD, jaringan FO, Lancarnya kegiatan operasional kantor	1 tahun	1 tahun	Realisasi sesuai dengan besaran tagihan telepon, listrik dan air serta efisiensi pemakaian air dan listrik
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	428,276,900	401,384,452	94%	26,892,448	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung	12 bulan, premi asuransi BMD dan PBB	12 bulan, premi asuransi BMD dan PBB	Biaya sesuai kebutuhan dan adanya efisiensi
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	1,648,117,200	1,646,986,676	100%	1,130,524	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Tersedianya kenyamanan dan kebersihan kantor	12 bulan, honorarium jasa kebersihan 23 orang, 12 sopir, 17 orang jasa pengamanan	12 bulan, honorarium jasa kebersihan 23 orang, 12 sopir, 17 orang jasa pengamanan	

5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	198,250,000	103,360,000	52%	94,890,000	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Terwujudnya jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	65 orang	65 orang	Adanya beberapa Anggota DPRD yang tidak melakukan medical check up
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	495,142,850	485,371,550	98%	9,771,300	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana	Tersedianya ketersediaan ATK	12 bulan	12 bulan	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	348,441,500	333,139,500	96%	15,302,000	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana	Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan	12 bulan	12 bulan	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104,225,800	104,075,156	100%	150,644	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana	Tercapainya ketersediaan penerangan pada bangunan/ruangan yang ada pada Kantor Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	154,265,000	150,420,000	98%	3,845,000	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada Kantor Sekretariat DPRD	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis, meja makan bulat dan tabung gas	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis, meja makan bulat dan tabung gas	

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	625,030,000	554,194,500	89%	70,835,500	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD	13 jenis koran, 1 jenis majalah, WPU dan 8 jenis buku bacaan	13 jenis koran, 1 jenis majalah, WPU dan 8 jenis buku bacaan	Efisiensi disebabkan karena adanya beberapa media cetak tidak tertib dan tidak dibayarkan
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	874,725,000	872,467,000	100%	2,258,000	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD	Terwujudnya ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	3,309,496,000	3,140,399,454	95%	169,096,546	Lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan adanya efisiensi
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	53,900,000	31,650,000	59%	22,250,000	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Meningkatnya ketahanan rohani dan jasmani staf Sekretariat DPRD	Instruktur senam dan penceramah agama	Instruktur senam dan penceramah agama	Efisiensi diakibatkan karena adanya pelaksanaan wirid bulanan dilaksanakan di mesjid raya
14	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip	383,630,000	363,955,560	95%	19,674,440	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Tertatanya administrasi arsip dengan baik	14 jenis	14 jenis	Adanya efisiensi penggunaan anggaran
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27,123,925,600	25,723,946,557	95%	1,399,979,043					
1	Pembangunan Gedung Kantor	17,920,587,500	17,612,832,333	98%	307,755,167	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	Meningkatnya pelayanan yang terbaik	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	

2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3,834,672,100	3,332,824,700	87%	501,847,400	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur perkantoran	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Aparatur DPRD Provinsi Sumatera Barat	6 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2	6 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2	Efisiensi akibat pembelian kendaraan yang dibawah jenis spesifikasi awal (double garda)
3	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	346,910,000	344,535,000	99%	2,375,000	Meningkatnya kualitas rumah jabatan/dinas/mess	Tersedianya perlengkapan pakai habis dan peralatan rumah jabatan/dinas/mess	Lemari dinding, tempat tidur, kulkas dan kebutuhan pokok Ketua DPRD selama 1 tahun	Lemari dinding, tempat tidur, kulkas dan kebutuhan pokok Ketua DPRD selama 1 tahun	
4	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor	566,138,000	523,981,500	93%	42,156,500	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Tersedianya perlengkapan kantor pakai habis, tersedianya peralatan kantor	Spanduk, tali bendera, marawa dan tiang bambu, spanduk isi billboard, bendera, roll blind, alat fitness, alat kesenian, pompa air, home teater dan komputer	Spanduk, tali bendera, marawa dan tiang bambu, spanduk isi billboard, bendera, roll blind, alat fitness, alat kesenian, pompa air, home teater dan komputer	Seluruh kegiatan terlaksana, sisa anggaran merupakan efisiensi
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	572,795,000	562,435,761	98%	10,359,239	Meningkatnya kualitas rumah jabatan/dinas/mess	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess	1 tahun, 5 orang pengaman, 5 orang petugas kebersihan	1 tahun, 5 orang pengaman, 5 orang petugas kebersihan	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	711,945,000	643,028,610	90%	68,916,390	Meningkatnya kualitas gedung perkantoran dan operasional Sekretariat DPRD	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun, bahan pembersih dan sewa bunga hidup	1 tahun, bahan pembersih dan sewa bunga hidup	Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran namun secara fisik telah sesuai dengan target

7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	257,135,000	244,827,893	95%	12,307,107	Meningkatnya kualitas kendaraan jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris	5 unit, pajak kendaraan	5 unit, pajak kendaraan	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,487,743,000	1,304,335,100	88%	183,407,900	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	104 unit, KIR dan pajak kendaraan	104 unit, KIR dan pajak kendaraan	Adanya efisiensi akibat penyerahan kendaraan operasional Dewan sebanyak 34 unit kepada Sekretariat Daerah
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	202,650,000	122,907,000	61%	79,743,000	Meningkatkan kualitas peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Pengisian tabung pemadam kebakaran, gas, pemeliharaan peralatan dan jaringan rumah dinas DPRD Prov. Sumbar	Pengisian tabung pemadam kebakaran, gas, pemeliharaan peralatan dan jaringan rumah dinas DPRD Prov. Sumbar	Efisiensi terhadap penggunaan anggaran dalam melaksanakan perbaikan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	69,750,000	67,350,000	97%	2,400,000	Meningkatkan kualitas mebeleur kantor	Terpeliharanya mebeleur kantor	5 jenis	5 jenis	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	680,600,000	503,876,600	74%	176,723,400	Meningkatkan kualitas peralatan dan perlengkapan perkantoran Sekretariat DPRD	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Pengisian tabung pemadam kebakaran, gas dan pemeliharaan aset	Pengisian tabung pemadam kebakaran, gas dan pemeliharaan aset	Adanya efisiensi akibat penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	70,000,000	68,512,060	98%	1,487,940	Meningkatkan kualitas instalasi dan jaringan perkantoran Sekretariat DPRD	Terpeliharanya instalasi dan jaringan kantor	1 tahun	1 tahun	
13	Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Dinas / Mess	45,000,000	44,550,000	99%	450,000	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	Terwujudnya pelayanan yang terbaik	Pos jaga rumah dinas	Pos jaga rumah dinas	
14	Rehabilitasi Sedang dan Berat Gedung Kantor	358,000,000	347,950,000	97%	10,050,000	Meningkatkan kualitas gedung kantor	Terwujudnya kondisi gedung yang baik	Rehab musalla, ruang fitnes dan garase kendaraan	Rehab musalla, ruang fitnes dan garase kendaraan	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	700,804,000	652,174,000	93%	48,630,000					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	700,804,000	652,174,000	93%	48,630,000	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur	Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dan Anggota DPRD dalam berpakaian dinas	397 stell dan 3 lambang daerah emas	397 stell dan 3 lambang daerah emas	Efisiensi dalam penggunaan anggaran
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	272,866,750	156,540,700	57%	116,326,050		Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan			
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	74,735,000	44,926,800	60%	29,808,200	Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD	Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	13 orang	13 orang	Adanya efisiensi karena faktor eksternal, pelaksanaan disesuaikan dengan undangan pihak terkait

2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	198,131,750	111,613,900	56%	86,517,850	Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD		18 orang	18 orang	Adanya efisiensi karena faktor eksternal, pelaksanaan disesuaikan dengan undangan pihak terkait
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	577,831,050	541,318,800	94%	36,512,250					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155,397,950	137,086,900	88%	18,311,050	Meningkatkan tertib administrasi keuangan	Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPJ, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan)	3 dokumen	3 dokumen	Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran BBM, foto copy, cetak dan penggandaan
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	422,433,100	404,231,900	96%	18,201,200	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	
VI	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	581,654,300	564,613,134	97%	17,041,166					
1	Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran SKPD	187,051,500	176,302,290	94%	10,749,210	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Tersedianya Renja, RKA, DPA	3 dokumen laporan	3 dokumen laporan	Adanya efisiensi pembelian bahan pakai habis, cetak, penggandaan, makan minum dan perjalanan dinas

2	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	394,602,800	388,310,844	98%	6,291,956	Meningkatkan kualitas gedung perkantoran dan operasional	Tertatanya administrasi aset dengan baik	12 bulan	12 bulan	
VI I	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	1,333,743,800	1,317,390,750	99%	16,353,050					
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	1,333,743,800	1,317,390,750	99%	16,353,050	Meningkatkan kualitas pelayanan tamu Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Pimpinan DPRD	Terlaksananya pelayanan tamu-tamu Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun	
VI II	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	#DIV/0!	-					
1	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	-	-	#DIV/0!	-			-	-	
IX	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64,201,781,263	47,822,560,190	74%	16,379,221,073					
1	Pembahasan Rancangan Perda	24,019,208,650	17,813,352,003	74%	6,205,856,647	Meningkatkan kualitas pemahaman Anggota DPRD	Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	22 ranperda / keputusan DPRD	22 ranperda / keputusan DPRD	Adanya efisiensi perjalanan dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembahasan Ranperda dan pelaksanaan konsultasi

2	Reses	4,803,960,000	4,021,045,842	84%	782,914,158	Meningkatkan kualitas pemahaman Anggota Dewan	Terjaringnya aspirasi masyarakat Kabupaten/kota untuk perencanaan Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat	3 reses (2 reses perorangan dan 1 reses kelompok) dan 19 kabupaten/kota	3 reses (2 reses perorangan dan 1 reses kelompok) dan 19 kabupaten/kota	Seluruh kegiatan terlaksana, sisa anggaran merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas (biaya penginapan)
3	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	25,149,288,863	17,270,567,244	69%	7,878,721,619	Meningkatkan kualitas pemahaman Anggota Dewan	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	Laporan kunjungan masa sidang / komisi dalam, luar daerah dan luar negeri	Laporan kunjungan masa sidang / komisi dalam, luar daerah dan luar negeri	Adanya efisiensi perjalanan dinas luar negeri yang disesuaikan dengan undangan mitra kerja
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	6,317,557,400	5,081,121,067	80%	1,236,436,333	Meningkatkan kualitas pemahaman Anggota Dewan	Meningkatkan kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas, wewenang	7 kali	7 kali	Adanya kegiatan perjalanan dinas yang tidak terlaksana karena terlambatnya izin dari Mendagri
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	143,160,000	70,010,000	49%	73,150,000	Meningkatkan kualitas pemahaman Anggota Dewan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	2 kegiatan	2 kegiatan	Adanya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan
6	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3,218,532,150	3,097,719,960	96%	120,812,190	Terlaksananya pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi	Terpublikasinya kegiatan Dewan di Media Cetak dan Elektronik	1 tahun	1 tahun	

7	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	188,630,700	160,380,800	85%	28,249,900	Meningkatkan penyelesaian kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dan ketersediaan waktu pelaksanaan
8	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang-undangan	204,433,500	165,294,274	81%	39,139,226	Meningkatkan produk hukum daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2 kajian	2 kajian	Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
9	Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda	157,010,000	143,069,000	91%	13,941,000	Meningkatkan produk hukum daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah	2 laporan / rekomendasi	2 laporan / rekomendasi	Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
TOTAL		106,684,545,813	87,924,834,907	82%	18,759,710,906					

Dari pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diinformasikan di atas ada yang memenuhi target ada yang tidak memenuhi target disebabkan karena belum terencanaanya program dan kegiatan dengan baik sehingga belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Akibat yang timbul dari program-program yang tidak memenuhi target mengakibatkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tidak tercapai dan rencana yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat terlaksana dengan baik dan perencanaan yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kedepan perlu kehatian-hatian dalam menyusun Rencana Kerja dan apabila dirasa tidak mungkin dapat terlaksana alangkah baiknya program dan kegiatan tersebut tidak dimunculkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T.C.29, pada tabel T.C.29 masing-masing kegiatan sudah dicantumkan target dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

TABEL T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Provinsi Sumatera Barat

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat yang tepat sasaran selama 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, air, listrik dan kawat / faksimili / internet / VPN untuk 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	

				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran PBB dan premi asuransi untuk 1 tahun	1 thn							
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun, Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang, Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 65 orang	1 kali							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK Sekretariat DPRD selama 12 bulan	1 thn							
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan selama 12 bulan	1 thn							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun	1 thn							
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis dan tabung gas 5 unit	2 paket							

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar / majalah dan buku sebanyak 126 eksemplar	6 paket							
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum / snack rapat DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	13 paket	10 paket	13 paket	13 paket				
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah selama 1 tahun	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah
				Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya honorarium instruktur senam, pembaca doa / al quran dan penceramah selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
				Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	Pendataan arsip aktif dan pasif DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	5 paket							
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun	1 thn	1 tahun					1 thn	1 thn

				Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang	1 thn	1 tahun					1 thn	1 thn	
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn	1 tahun					1 thn	1 thn	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	10 macam					1 thn	1 thn	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik									
				Pembangunan Gedung Kantor	1 unit gedung kantor	1	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	
				Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur	3 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	3 paket	3 paket	
				Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Laptop, PC, Scaner, Printer Photo, Printer, Kamera Shoting, Kamera Tustel, Handycam, CD Player, Televisi, Alat Fitnes, Alat Musik	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn			

					Pengadaan mebeleur	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	9 paket	2 paket	9 paket	9 paket						
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun, Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan	1 tahun	1 thn						1 tahun	1 tahun	

				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun				
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun		
				Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%									
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang	2 paket									
				Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024		0									
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat										

				Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah	12 kali	10 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	12 kali	12 kali
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah	10 kali	24 orang	10 kali	10 kali				
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan wawasan untuk 4 bagian pada Sekretariat DPRD	0	4 bagian						
				Pelatihan Kantor Sendiri	Terlaksananya pelatihan pegawai Sekretariat DPRD untuk 50 orang	0	50 orang						
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan								
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD	3 dokumen							

				Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	1 tahun	3 dokumen						
				Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra, persentase kesesuaian Renja dengan RPJMD dan pengendalian asset OPD								
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	1 tahun							
				Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun							
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Persentase koordinasi dengan Kabupaten / Kota								

				Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun								
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya studi banding antar provinsi									
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan wawasan untuk 4 bagian pada Sekretariat DPRD	1 tahun								
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya pemahaman dan penetapan rancangan APBD tepat waktu, jumlah perda yang disetujui, jumlah rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
				Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya penetapan Perda / Keputusan DPRD	22 Ranperda / 38 Keputusan DPRD	19 Ranperda a, 2 KUA/PP AS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	20 Ranperda / Keputusan DPRD	20 Ranperda / Keputusan DPRD	

				Reses	Terlaksananya reses perorangan dan reses kelompok	3 reses							
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terwujudnya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	20 kali							
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Terlaksananya workshop	6 kali							
				Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ranperda dan keputusan DPRD kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar	3 keg							
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen publikasi	1 tahun							
				Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota	2 laporan							

				Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Tersusunnya laporan hasil kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	
				Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar	2 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	2 keg	2 keg
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD dalam daerah	1 tahun	laporan 12 keg, 19 kab/kota					1 tahun	1 tahun
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	3 masa sidang	6 keg					3 masa sidang	3 masa sidang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersusunnya laporan hasil diskusi	2 laporan	2 laporan						

Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2017 dengan jumlah Program sebanyak 9 program dan kegiatan sebanyak 46 (empat puluh enam) kegiatan dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, terdiri dari 14 kegiatan, antara lain:

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 4 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
- 5 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD
- 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- 13 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
- 14 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, terdiri dari 14 kegiatan, antara lain:

- 1 Pembangunan Gedung Kantor
- 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 4 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor
- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelaur
- 11 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan kantor
- 12 Pemeliharaan Rutin / berkala instalasi dan jaringan
- 13 Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Dinas / Rumah Jabatan
- 14 Rehabilitasi Sedang dan Berat Gedung Kantor

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR, terdiri dari 1 kegiatan, antara lain:

- 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, terdiri dari 2 kegiatan, antara lain:

- 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN, terdiri dari 2 kegiatan, antara lain:

- 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 Penatausahaan Keuangan SKPD

VI PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET, terdiri dari 2 kegiatan, antara lain:

- 1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- 2 Pengelolaan, Pengawasan asset SKPD

VII PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, terdiri dari 1 kegiatan, antara lain:

- 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah

VIII PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR, terdiri dari 1 kegiatan, antara lain:

- 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

IX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, terdiri dari 9 kegiatan, antara lain:

- 1 Pembahasan Rancangan Perda
- 2 Reses
- 3 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- 4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD
- 5 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 6 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- 7 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerUU
- 8 Kajian Peraturan Perundang-undang Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan
- 9 Seminar dalam Rangka Pembahasan Ranperda

Berdasarkan DPA dan aliran kas pada program dan kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan capaian kegiatan diatas 83% .

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2018 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan perkiraan mencapai 100 %, dengan batas minimal 95 % sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala SKPD dengan Gubernur Sumatera Barat, kegagalan Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan dibawah 95 % maka Sekretariat DPRD dianggap belum mampu mengemban amanah yang telah disepakati dan selayaknya mendapat teguran/punishman dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah, untuk tidak terjadi hal yang demikian maka Sekretariat DPRD akan berusaha menjalankan amanah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dtuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan berkaca pada pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 Sekertariat DPRD masih ada yang belum memenuhi target baik fisik maupun keuangan maka untuk

tahun 2018 Sekretariat DPRD memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan dengan tujuan supaya kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target pada tahun 2017 dapat memenuhi target baik fisik maupun keuangan dengan artian tidak memperhatikan program dan kegiatan yang telah memenuhi harapan yang sudah ditetapkan.

Untuk Capaian target Renstra Sekretariat DPRD dengan realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel T.C.30, pada tabel tersebut dapat dilihat capaian target Renstra dengan Realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada tabel ini Sekretariat DPRD menampilkan target Renstra Tahun 2017 dengan realisasi tahun 2017 dan perkiraan capaian pada tahun 2018.

TABEL T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD : SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
KONDISI TAHUN 2016

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA OPD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
				thn (n-1)	thn (n)	thn (n+1)	thn (n-1)		thn (n)	thn (n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Jumlah Peraturan Daerah disetujui / ditetapkan oleh DPRD			19 buah	19 buah	19 buah	19 buah	100%	19 buah	19 buah	
2	Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)			1.112 kali	1.112 kali	1.112 kali	1.112 kali	100%	1.112 kali	1.112 kali	
3	Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)			12 buah	12 buah	12 buah	12 buah	100%	12 buah	12 buah	
4	Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD			19 buah	19 buah	19 buah	19 buah	100%	19 buah	19 buah	
5	Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD : SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
KONDISI TAHUN 2017

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA OPD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
				thn (n-1)	thn (n)	thn (n+1)	thn (n-1)		thn (n)	thn (n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Jumlah produk hukum yang dihasilkan fungsi legislasi			22 buah	22 buah	22 buah	12 buah	54.54	22 buah	22 buah	
2	Persentase penyelesaian kegiatan fungsi anggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah media yang mempublikasikan kegiatan DPRD			45 media	45 media	45 media	41 media	91.11	45 media	45 media	
4	Jumlah dokumentasi hasil kegiatan DPRD			30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%	30 dokumen	30 dokumen	
5	Persentase pegawai yang mendukung kinerja dengan kebutuhan pegawai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase ketersediaan aset dengan kebutuhan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase kegiatan DPRD dengan layanan yang diberikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja			A	A	A	A	A	A	A	
9	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas			100%	100%	100%	86%	86%	100%	100%	

TABEL T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD : SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
KONDISI TAHUN 2018 - 2021

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA OPD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	TAHUN 2019		
				thn (n-1)	thn (n)	thn (n+1)	thn (n-1)		thn (n)	thn (n+1)		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	
1	Persentase kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja			A	A	A	A	A	A	A	A	
3	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase jumlah kebutuhan anggaran program kegiatan dengan ketersediaan anggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

b. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas dan fungsi Dewan sesuai SOP, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Program yang menyangkut dengan Program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan beberapa kegiatan. Jenis Indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengacu pada PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur dukungan staf memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan, maka tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD adalah ditandai dengan terlaksananya fungsi DPRD sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja tahun 2018 ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tolok ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji yaitu Tolok ukur pertama adalah Terlaksananya Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tolok ukur kedua adalah Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Prosedur (SOP). Tolok ukur ketiga adalah tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Presentase Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat). Tolok ukur keempat adalah Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki dengan Indikator Kinerja adalah Presentase kesesuaian penempatan PNS antara disiplin ilmu dengan tugas pokok. Tolok ukur kelima adalah Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator kerjanya adalah Peningkatan kehadiran staf. Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian yang diperoleh dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Untuk melihat hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Tabel T.VI.C.1 yang sudah ditampilkan di atas.

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

a. Tingkat Pelayanan kinerja OPD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada paragraf 2 Pasal 9 (5), dimana Sekretariat DPRD melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Fungsi tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sebagai pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD yang akan dijabarkan oleh masing-masing bagian di Sekretariat DPRD.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
2. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
3. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integritas, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LMS.
4. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
5. Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
6. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
7. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
8. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
9. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Dari kondisi yang kami kemukakan di atas dengan memanfaatkan peluang yang ada serta memaksimalkan staf yang ada hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021; dimana Visi Pembangunan Sumatera Barat yang ingin diwujudkan pada periode 2016–2021 adalah **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA.**

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi Kedua yaitu: “**Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih**

dan professional” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) dan bersih (Clean Governace) serta profesionalisme pelayanan publik” dan sasaran RPJMD “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya” yang akan dilaksanakan melalui program-program SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Program Utama “**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**”

Program Penunjang:

- 1) Program Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “**Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Rancangan APBD tepat waktu, jumlah Perda yang disetujui, jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah**” dalam kurun waktu 5 tahun.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada :

- 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan

eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (**strengths**)

Pada sisi *kekuatan* terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan **penghubung** antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2) Dukungan **anggaran** yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi **fasilitasi** terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

b. Kelemahan (**weaknesses**)

Pada sisi *kelemahan*, terdapat faktor-faktor yaitu: "Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan".

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (**Opportunities**)

Pada sisi *peluang*, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan public kedepan;

b. Tantangan / ancaman / hambatan (**Threats**)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi

fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan public dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra K/L maupun Kabupaten/Kota.

- e. Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk tahun 2019 kami akan berusaha dan merekomendasikan dengan Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah dengan mewujudkan **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”** merumuskan program dan kegiatan yang akan dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana Kerja ini.

d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kalau kita bandingkan dengan rancangan awal Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tidak terdapat perbedaan antara program kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dengan tahun 2018, dimana pada Rencana Kerja tahun 2019 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 6 (enam) program dengan 54 (lima puluh empat) kegiatan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan tahun 2019.

TABEL.T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
Belanja Langsung					106,443,000,000	Belanja Langsung					106,443,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	19,050,437,670	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	19,050,437,670	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Terkirimnya surat yang tepat sasaran selama 1 tahun	1 thn	2,081,432,160	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Terkirimnya surat yang tepat sasaran selama 1 tahun	1 thn	2,081,432,160	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran biaya telepon, air, listrik dan kawat / faksimili / internet / VPN untuk 1 tahun	1 thn	3,332,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran biaya telepon, air, listrik dan kawat / faksimili / internet / VPN untuk 1 tahun	1 thn	3,332,400,000	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Pembayaran PBB dan premi asuransi untuk 1 tahun	1 thn	486,900,000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Pembayaran PBB dan premi asuransi untuk 1 tahun	1 thn	486,900,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service, sopir kantor dan satpam kantor selama 1 tahun	1 thn	2,210,050,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service, sopir kantor dan satpam kantor selama 1 tahun	1 thn	2,210,050,000	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang	Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 65 orang	1 kali	780,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang	Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 65 orang	1 kali	780,000,000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	ATK Sekretariat DPRD selama 12 bulan	1 thn	296,491,450	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	ATK Sekretariat DPRD selama 12 bulan	1 thn	296,491,450	

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Cetak dan penggandaan selama 12 bulan	1 thn	452,660,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Cetak dan penggandaan selama 12 bulan	1 thn	452,660,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	Alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun	1 thn	84,706,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	Alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun	1 thn	84,706,400
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Padang	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis dan tabung gas 5 unit	2 paket	64,305,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Padang	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis dan tabung gas 5 unit	2 paket	64,305,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Tersedianya surat kabar / majalah dan buku sebanyak 126 eksemplar	6 paket	848,920,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Tersedianya surat kabar / majalah dan buku sebanyak 126 eksemplar	6 paket	848,920,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Makan dan minum / snack rapat DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	13 paket	1,214,942,500	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Makan dan minum / snack rapat DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	13 paket	1,214,942,500
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Padang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah selama 1 tahun	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	6,246,990,160	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Padang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah selama 1 tahun	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	6,246,990,160
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Terlaksananya honorarium instruktur senam, pembaca doa / al quran dan penceramah selama 1 tahun	1 tahun	322,600,000	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Terlaksananya honorarium instruktur senam, pembaca doa / al quran dan penceramah selama 1 tahun	1 tahun	322,600,000
14	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	Padang	Pendataan arsip aktif dan pasif DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	5 paket	413,340,000	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	Padang	Pendataan arsip aktif dan pasif DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	5 paket	413,340,000
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning	1 thn	-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	Pembayaran retribusi sampah dan	1 thn	-

			service untuk 1 tahun					jasa cleaning service untuk 1 tahun			
16	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Padang	Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang	1 thn	-	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Padang	Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang	1 thn	-	
17	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Padang	Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn	-	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Padang	Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn	-	
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tesedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	39,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tesedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	39,500,000	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	175,200,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	175,200,000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Padang	Persentase fungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik		23,094,369,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Padang	Persentase fungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik		23,094,369,000	
1	Pembangunan Gedung Kantor	Padang	1 unit gedung kantor	0.9	3,000,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Padang	1 unit gedung kantor	0.9	3,000,000,000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit	4 unit	1,975,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit	4 unit	1,975,000,000	
3	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur	3 paket	450,200,000	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur	3 paket	450,200,000	
4	Pengadaan mebeleur	Padang	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	9 paket	257,700,000	Pengadaan mebeleur	Padang	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	9 paket	257,700,000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Padang	Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	720,600,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Padang	Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	720,600,000	

6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun	1 tahun	1,354,479,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun	1 tahun	1,354,479,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Padang	Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun	1 tahun	516,590,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Padang	Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun	1 tahun	516,590,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun	1 tahun	1,779,150,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun	1 tahun	1,779,150,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	196,500,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	196,500,000
10	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Padang	Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun	1 tahun	69,750,000	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Padang	Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun	1 tahun	69,750,000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	Pemeliharaan instalasi dan jaringan gedung kantor untuk 1 tahun	1 tahun	220,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	Pemeliharaan instalasi dan jaringan gedung kantor untuk 1 tahun	1 tahun	220,000,000
12	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess	Padang	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas / rumah jabatan	1 unit	4,200,000,000	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess	Padang	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas / rumah jabatan	1 unit	4,200,000,000
13	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Padang	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor	1 unit	5,832,000,000	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Padang	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor	1 unit	5,832,000,000
14	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	UPS, Laptop, PC dan printer 10 unit	1 tahun	554,000,000	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	UPS, Laptop, PC dan printer 10 unit	1 tahun	554,000,000

15	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Pengadaan infocus, kamera, handycam dan conference system 1 unit	1 tahun	190,000,000	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Pengadaan infocus, kamera, handycam dan conference system 1 unit	1 tahun	190,000,000	
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun	1 tahun	109,000,000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun	1 tahun	109,000,000	
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun		411,150,000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun		411,150,000	
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun	48,250,000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun	48,250,000	
19	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun	-	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun	-	
20	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1,210,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1,210,000,000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Padang	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	1,817,150,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Padang	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	1,817,150,000	

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang	2 paket	1,817,150,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang	2 paket	1,817,150,000	
2	Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024	Padang			-	Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024	Padang			-	
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		838,040,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		838,040,000	
1	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Padang	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah	12 kali	406,952,000	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Padang	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah	12 kali	406,952,000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Padang	Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah	10 kali	431,088,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Padang	Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah	10 kali	431,088,000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Padang	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		1,629,360,660	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Padang	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		1,629,360,660	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Tersedianya laporan keuangan SKPD	3 dokumen	310,164,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Padang	Tersedianya laporan keuangan SKPD	3 dokumen	310,164,000	

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD untuk 1 tahun	1 tahun	460,696,080	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD untuk 1 tahun	1 tahun	460,696,080	
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan		334,620,500	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan		334,620,500	
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun	523,880,080	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun	523,880,080	
VII	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Padang	Terlaksananya pemahaman dan penetapan rancangan APBD tepat waktu, jumlah perda yang disetujui, jumlah rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah		60,013,642,670	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Padang	Terlaksananya pemahaman dan penetapan rancangan APBD tepat waktu, jumlah perda yang disetujui, jumlah rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah		60,013,642,670	
1	Pembahasan Rancangan Perda	Padang	Terlaksananya penetapan Perda / Keputusan DPRD	20 Ranperda / Keputusan DPRD	21,133,471,100	Pembahasan Rancangan Perda	Padang	Terlaksananya penetapan Perda / Keputusan DPRD	20 Ranperda / Keputusan DPRD	21,133,471,100	

2	Reses	Padang	Terlaksananya reses perorangan dan reses kelompok	3 reses	6,578,910,000	Reses	Padang	Terlaksananya reses perorangan dan reses kelompok	3 reses	6,578,910,000
3	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Padang	Terlaksananya workshop	6 kali	4,748,466,000	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Padang	Terlaksananya workshop	6 kali	4,748,466,000
4	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Padang	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ranperda dan keputusan DPRD kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar	3 keg	995,649,000	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Padang	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ranperda dan keputusan DPRD kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar	3 keg	995,649,000
5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Padang	Tersusunnya dokumen publikasi	1 tahun	4,565,402,000	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Padang	Tersusunnya dokumen publikasi	1 tahun	4,565,402,000
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota	2 laporan	78,638,000	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota	2 laporan	78,638,000
7	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Padang	Tersusunnya laporan hasil kajian	2 kajian	87,985,000	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Padang	Tersusunnya laporan hasil kajian	2 kajian	87,985,000
8	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Padang	Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar	2 keg	166,130,000	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Padang	Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar	2 keg	166,130,000
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Padang	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris	1 tahun	7,373,761,570	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Padang	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan	1 tahun	7,373,761,570

			DPRD dalam daerah					Sekretaris DPRD dalam daerah			
10	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Padang	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	3 masa sidang	12,621,165,000	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Padang	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	3 masa sidang	12,621,165,000	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Padang	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun	1,664,065,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Padang	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun	1,664,065,000	

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pengusulan program untuk tahun 2019 sama dengan tahun 2018 tapi berbeda dengan program tahun-tahun sebelum tahun 2017 dimana ada 6 (enam) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dapat kami jelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menerima usulan dari masyarakat program dan kegiatan yang diusulkan ini adalah murni dari Sekretariat DPRD karena untuk mendukung kelancaran tugas dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas DPRD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau diperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan tahun 2019 dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dirasa tidak akan berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD karena hanya program yang berubah dalam pengusulan program tahun 2019 namun kegiatan yang disajikan masih relevan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini kami sajikan Tabel T.VI.C.9

**TABEL T.VI.C.9
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Terkirimnya surat yang tepat sasaran selama 1 tahun	1 thn
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran biaya telepon, air, listrik dan kawat / faksimili / internet / VPN untuk 1 tahun	1 thn
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Pembayaran PBB dan premi asuransi untuk 1 tahun	1 thn
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang	Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 65 orang	1 kali
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	ATK Sekretariat DPRD selama 12 bulan	1 thn
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Cetak dan penggandaan selama 12 bulan	1 thn
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	Alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun	1 thn
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Padang	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis dan tabung gas 5 unit	2 paket
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Tersedianya surat kabar / majalah dan buku sebanyak 126 eksemplar	6 paket
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Makan dan minum / snack rapat DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	13 paket
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Padang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah selama 1 tahun	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Terlaksananya honorarium instruktur senam, pembaca doa / al quran dan penceramah selama 1 tahun	1 tahun
13	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	Padang	Pendataan arsip aktif dan pasif DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	5 paket
14	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun	1 thn
15	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Padang	Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang	1 thn
16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Padang	Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Padang	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	
1	Pembangunan Gedung Kantor	Padang	1 unit gedung kantor	0.8
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit	4 unit

3	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur	3 paket
4	Pengadaan mebeleur	Padang	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	9 paket
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Padang	Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun	1 tahun
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Padang	Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun	1 tahun
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun	1 tahun
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun
10	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Padang	Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun	1 tahun
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Padang	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun, Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun, Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	Pemeliharaan instalasi dan jaringan gedung kantor untuk 1 tahun	1 tahun
13	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	UPS, Laptop, PC dan printer 10 unit	1 tahun
14	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Pengadaan infocus, kamera, handycam dan conference system 1 unit	1 tahun
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun	1 tahun
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun
17	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun
18	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess	Padang	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas / rumah jabatan	1 tahun
19	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Padang	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor	1 tahun
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Padang	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang	2 paket
2	Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024	Padang		1 kali
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Padang	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	
1	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Padang	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah	12 kali
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Padang	Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah	10 kali

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Padang	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Tersedianya laporan keuangan SKPD	3 dokumen
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD untuk 1 tahun	1 tahun
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Padang	Terlaksananya pemahaman dan penetapan rancangan APBD tepat waktu, jumlah perda yang disetujui, jumlah rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
1	Pembahasan Rancangan Perda	Padang	Terlaksananya penetapan Perda / Keputusan DPRD	20 Ranperda / Keputusan DPRD
2	Reses	Padang	Terlaksananya reses perorangan dan reses kelompok	3 reses
3	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Padang	Terlaksananya workshop	6 kali
4	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Padang	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ranperda dan keputusan DPRD kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar	3 keg
5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Padang	Tersusunnya dokumen publikasi	1 tahun
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota	2 laporan
7	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Padang	Tersusunnya laporan hasil kajian	2 kajian
8	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Padang	Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar	2 keg
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Padang	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD dalam daerah	1 tahun
10	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Padang	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	3 masa sidang
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Padang	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang secara Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada DPRD yaitu membantu kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Menyangkut kebijakan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat pada Prioritas II Yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, Sekretariat DPRD mendukung rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Reformasi Birokrasi dibidang pemerintahan yaitu dengan meningkatkan Disiplin Aparatur, mencegah terjadinya perbuatan KKN, meningkatkan kemampuan SDM dibidang tugasnya. dan mendukung pelaksanaan Program Nasional yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Pokok yang tertuang dalam dokumen RPJMN yang diakomodir dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan beberapa kegiatan yang mempunyai sasaran, tujuan dan kebijakan sudah sesuai dengan Kebijakan Nasional dan ditambah dengan beberapa program lainnya sebagai pendukung program pokok dalam memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan hak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Program dan kegiatan tersebut sudah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Maka sesuai dengan pernyataan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil penyempurnaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi Kedua yaitu: “**Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional**” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) dan bersih (Clean Governace) serta profesionalisme pelayanan publik” dan sasaran RPJMD “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya”.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **visinya “Menjadi Sekretariat Dewan terbaik dalam Memfasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD”**.

Dan **misi** yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD,
2. Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien serta akuntabel,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepastakaan.
4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2016 s/d 2021, adalah :

- 1) Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,
- 2) Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang ditetapkan antara lain;

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM,
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD,
- 3) Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang struktur organisasi.

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Melakukan evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.
3. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah yang didukung oleh Visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tahun 2019, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan dan merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
- 12 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

- 13 Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD
- 14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 15 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
- 16 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- 17 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Pembangunan Gedung Kantor
- 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
- 4 Pengadaan mebeleur
- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
- 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
- 10 Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur
- 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
- 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
- 13 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess
- 14 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
- 15 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- 16 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
- 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
- 18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- 19 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
- 20 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- 2 Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan

- 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2 Penatausahaan Keuangan SKPD
 - 3 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
 - 1 Pembahasan Rancangan Perda
 - 2 Reses
 - 3 Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD
 - 4 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
 - 5 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - 6 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
 - 7 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU
 - 8 Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda
 - 9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
 - 10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah
 - 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2019 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 53 (lima puluh tiga) kegiatan dengan jumlah plafon dana sebesar Rp. 106.443.000.000,- (seratus enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA	JUMLAH KEGIATAN / PROGRAM TAHUN 2019
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,050,437,670	19,050,437,670
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,081,432,160	2,081,432,160
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,332,400,000	3,332,400,000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	486,900,000	486,900,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	2,210,050,000	2,210,050,000
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	780,000,000	780,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	296,491,450	296,491,450
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	452,660,000	452,660,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84,706,400	84,706,400
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	64,305,000	64,305,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	848,920,000	848,920,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,214,942,500	1,214,942,500
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	6,246,990,160	6,246,990,160
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	322,600,000	322,600,000
14	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	413,340,000	413,340,000
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,500,000	39,500,000
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175,200,000	175,200,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23,094,369,000	23,094,369,000

1	Pembangunan Gedung Kantor	3,000,000,000	3,000,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,975,000,000	1,975,000,000
3	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	450,200,000	450,200,000
4	Pengadaan mebeleur	257,700,000	257,700,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	720,600,000	720,600,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,354,479,000	1,354,479,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	516,590,000	516,590,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,779,150,000	1,779,150,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	196,500,000	196,500,000
10	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	69,750,000	69,750,000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	220,000,000	220,000,000
12	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess	4,200,000,000	4,200,000,000
13	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	5,832,000,000	5,832,000,000
14	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	554,000,000	554,000,000
15	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	190,000,000	190,000,000
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	109,000,000	109,000,000
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411,150,000	411,150,000
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	48,250,000	48,250,000
19	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,210,000,000	1,210,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,817,150,000	1,817,150,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1,817,150,000	1,817,150,000
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	838,040,000	838,040,000
1	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	406,952,000	406,952,000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	431,088,000	431,088,000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,629,360,660	1,629,360,660
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	310,164,000	310,164,000
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	460,696,080	460,696,080
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	334,620,500	334,620,500
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	523,880,080	523,880,080

VII	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	60,013,642,670	60,013,642,670
1	Pembahasan Rancangan Perda	21,133,471,100	21,133,471,100
2	Reses	6,578,910,000	6,578,910,000
3	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	4,748,466,000	4,748,466,000
4	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	995,649,000	995,649,000
5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	4,565,402,000	4,565,402,000
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	78,638,000	78,638,000
7	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	87,985,000	87,985,000
8	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	166,130,000	166,130,000
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	7,373,761,570	7,373,761,570
10	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	12,621,165,000	12,621,165,000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	1,664,065,000	1,664,065,000
TOTAL ANGGARAN		106,443,000,000	106,443,000,000

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T.C.33 berikut:

Tabel T.C.33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Padang	100%	19,050,437,670	APBD	100%	21,910,978,013
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat yang tepat sasaran selama 1 tahun	Padang	1 thn	2,081,432,160	APBD	1 thn	1,906,175,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, air, listrik dan kawat / faksimili / internet / VPN untuk 1 tahun	Padang	1 thn	3,332,400,000	APBD	1 thn	3,332,400,000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran PBB dan premi asuransi untuk 1 tahun	Padang	1 thn	486,900,000	APBD	1 thn	484,315,022
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service, sopir kantor dan satpam kantor selama 1 tahun	Padang	1 thn	2,210,050,000	APBD	1 thn	-
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 65 orang	Padang	1 kali	780,000,000	APBD	1 kali	780,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK Sekretariat DPRD selama 12 bulan	Padang	1 thn	296,491,450	APBD	1 thn	296,491,450
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan selama 12 bulan	Padang	1 thn	452,660,000	APBD	1 thn	322,660,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun	Padang	1 thn	84,706,400	APBD	1 thn	84,706,400
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis dan tabung gas 5 unit	Padang	2 paket	64,305,000	APBD	2 paket	64,305,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar / majalah dan buku sebanyak 126 eksemplar	Padang	6 paket	848,920,000	APBD	6 paket	848,920,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum / snack rapat DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	Padang	13 paket	1,214,942,500	APBD	13 paket	1,476,035,000

12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah selama 1 tahun	Padang	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	6,246,990,160	APBD	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	8,884,908,141
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya honorarium instruktur senam, pembaca doa / al quran dan penceramah selama 1 tahun	Padang	1 tahun	322,600,000	APBD	1 tahun	322,600,000
14	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD	Pendataan arsip aktif dan pasif DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	Padang	5 paket	413,340,000	APBD	5 paket	719,812,000
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun	Padang	1 thn	-	APBD	1 thn	1,010,550,000
16	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang	Padang	1 thn	-	APBD	1 thn	489,150,000
17	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	Padang	1 thn	-	APBD	1 thn	712,750,000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	1 thn	39,500,000	APBD	1 thn	0
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	1 thn	175,200,000	APBD	1 thn	175,200,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Padang		23,094,369,000	APBD		10,962,889,080
1	Pembangunan Gedung Kantor	1 unit gedung kantor	Padang	0.9	3,000,000,000	APBD	0.9	0
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit	Padang	4 unit	1,975,000,000	APBD	4 unit	2,625,000,000
3	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur	Padang	3 paket	450,200,000	APBD	3 paket	450,200,000
4	Pengadaan mebeleur	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	Padang	9 paket	257,700,000	APBD	9 paket	257,700,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	Padang	1 tahun	720,600,000	APBD	1 tahun	720,600,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun	Padang	1 tahun	1,354,479,000	APBD	1 tahun	1,364,479,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun	Padang	1 tahun	516,590,000	APBD	1 tahun	516,590,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun	Padang	1 tahun	1,779,150,000	APBD	1 tahun	1,779,150,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	Padang	1 tahun	196,500,000	APBD	1 tahun	196,500,000

10	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun	Padang	1 tahun	69,750,000	APBD	1 tahun	74,750,000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan instalasi dan jaringan gedung kantor untuk 1 tahun	Padang	1 tahun	220,000,000	APBD	1 tahun	200,000,000
12	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas / rumah jabatan	Padang	1 tahun	4,200,000,000	APBD	1 tahun	420,000,000
13	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor	Padang	1 unit	5,832,000,000	APBD	1 unit	420,000,000
14	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	UPS, Laptop, PC dan printer 10 unit	Padang	1 unit	554,000,000	APBD	1 unit	359,000,000
15	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pengadaan infocus, kamera, handycam dan conference system 1 unit	Padang	1 tahun	190,000,000	APBD	1 tahun	190,000,000
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun	Padang	1 tahun	109,000,000	APBD	1 tahun	115,500,000
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	Padang	1 tahun	411,150,000	APBD	1 tahun	411,150,000
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	Padang	1 tahun	48,250,000	APBD	1 tahun	48,250,000
19	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	Padang	1 tahun	-	APBD	1 tahun	604,020,080
20	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	1 tahun	1,210,000,000	APBD	1 tahun	210,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Padang	100%	1,817,150,000	APBD	100%	1,727,150,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang	Padang	2 paket	1,817,150,000	APBD	2 paket	1,727,150,000
2	Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024		Padang		-	APBD		0
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	Padang		838,040,000	APBD		838,040,000
1	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah	Padang	12 kali	406,952,000	APBD	12 kali	406,952,000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan tekhnis dalam daerah dan luar daerah	Padang	10 kali	431,088,000	APBD	10 kali	431,088,000

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	Padang		1,629,360,660	APBD		1,223,500,580
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Padang	3 dokumen	310,164,000	APBD	3 dokumen	362,424,000
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD untuk 1 tahun	Padang	1 tahun	460,696,080	APBD	1 tahun	460,696,080
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	Padang		334,620,500	APBD		400,380,500
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	Padang		523,880,080	APBD		0
VII	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya pemahaman dan penetapan rancangan APBD tepat waktu, jumlah perda yang disetujui, jumlah rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Padang		60,013,642,670	APBD		77,893,950,468
1	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya penetapan Perda / Keputusan DPRD	Padang	20 Ranperda / Keputusan DPRD	21,133,471,100	APBD	20 Ranperda / Keputusan DPRD	22,783,071,100
2	Reses	Terlaksananya reses perorangan dan reses kelompok	Padang	3 reses	6,578,910,000	APBD	3 reses	6,578,910,000
3	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Terlaksananya workshop	Padang	6 kali	4,748,466,000	APBD	6 kali	7,109,934,000
4	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ranperda dan keputusan DPRD kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar	Padang	3 keg	995,649,000	APBD	3 keg	995,649,000
5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen publikasi	Padang	1 tahun	4,565,402,000	APBD	1 tahun	4,983,164,000
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota	Padang	2 laporan	78,638,000	APBD	2 laporan	78,638,000
7	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Tersusunnya laporan hasil kajian	Padang	2 kajian	87,985,000	APBD	2 kajian	87,985,000

8	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar	Padang	2 keg	166,130,000	APBD	2 keg	166,130,000
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD dalam daerah	Padang	1 tahun	7,373,761,570	APBD	1 tahun	18,624,946,368
10	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	Padang	3 masa sidang	12,621,165,000	APBD	3 masa sidang	14,821,458,000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	Padang	1 tahun	1,664,065,000	APBD	1 tahun	1,664,065,000
					106,443,000,000			114,556,508,141

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Tahun 2019 yang merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Kerja (Renja) ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergis antar unit kerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan atau dengan Dinas, Badan, Lembaga, dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tuntutan masyarakat, dengan harapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat menjadi perhatian kita bersama bahwa usulan program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan program dari masing-masing pemangku kepentingan (Bagian) di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah Sumatera Barat maka kami berharap usulan program dan kegiatan ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dapat direalisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 karena program dan kegiatan yang diajukan ini adalah menyangkut kepentingan bersama dalam mendukung visi dan misi kepada daerah dan menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian harapan kita agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita bersama terutama bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 28 Maret 2018

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

H. Raflis, SH, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19640930 198602 1 002